

OPTIMALISASI PENANGKALAN RADIKALISME DAN EKSTRIMISME MELALUI SINERGI SANTRI DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI BANYUWANGI

OPTIMIZATION OF DEFENDING RADICALISM AND EXTRIMISM THROUGH THE SYNERGY OF SANTRI AND THE REPUBLIC OF INDONESIA POLICE IN BANYUWANGI

Prawitra Thalib, Septi Ariadi, Mohamad Nur Kholiq

Prawitra@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

Abstract

Peace and harmony are the main elements in creating national unity, and national unity is a prerequisite for successful national development in order to realize a just, advanced and prosperous Indonesia as we aspire to. Muslims in Indonesia can live side by side in peace and harmony with followers of other religions because Islam in Indonesia came and developed in a peaceful way, or with the principle of the middle way (wasthiyah). This principle was successfully realized, in part, thanks to the role of the ulama as heirs of the prophets and torches of example for the people. However, in recent developments the issue of radicalism and extremism among Muslims continues to emerge, especially in Islamic boarding schools. The developments that occur must also be balanced with the ability of the National Police to be able to handle any problems that occur, both pre-emptively, preventively and curatively through preventing, preventing and handling problems so that the image of Muslims, especially Islamic boarding schools, is protected from radicalism or extremism. As an effort to overcome this, the National Police (Republic of Indonesia Police) is needed to be able to carry out duties in preventing and dealing with radicalism and extremism. The National Police has established strategic policies, which include outreach that seeks to keep Islamic boarding schools away from radicalism and extremism.

Keywords: *Police, Radicalism, Extremism, Order, Security.*

Abstrak

Perdamaian dan kerukunan merupakan unsur utama terciptanya persatuan nasional, dan persatuan nasional merupakan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia adil, maju dan sejahtera sebagaimana yang kita cita-citakan. umat Islam di Indonesia dapat hidup berdampingan dalam perdamaian dan kerukunan bersama pemeluk agama lain karena Islam di Indonesia datang dan berkembang dengan cara yang damai, atau dengan prinsip jalan tengah (*wasthiyah*). Prinsip tersebut berhasil terwujud salah satunya berkat peran dari para ulama sebagai pewaris para nabi dan obor keteladanan bagi umat. Tetapi, perkembangan dewasa ini isu radikalisme dan ekstrimisme pada umat Islam terus bergulir khususnya pada Pondok Pesantren. Perkembangan yang terjadi tersebut juga harus diimbangi dengan kemampuan Polri untuk dapat menangani setiap masalah yang terjadi, baik secara pre-emptif, preventif maupun kuratif melalui penangkalan, pencegahan dan penanganan suatu masalah agar citra umat Islam khususnya pada Pondok Pesantren terhindari dari radikalisme maupun ekstrimisme. Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, diperlukan sosok Polri (Kepolisian Republik Indonesia) agar mampu melakukan tugas dalam pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan ekstrimisme, Polri telah menetapkan kebijakan yang bersifat strategis, yang diantaranya berupa penyuluhan yang mengupayakan agar Pondok Pesantren jauh dari radikalisme dan ekstrimisme.

Kata Kunci: *Polri, Radikalisme, Ekstrimisme, Ketertiban, Keamanan.*

I. Pendahuluan

Pada hakikatnya, radikalisme dan terorisme adalah persoalan konflik budaya dalam suatu masyarakat nasional yang bersifat plural secara kultural. sehingga pencegahan, baik sebagai strategi pencegahan awal (preventive) dan aksi dadakan (pre-emptive) melalui budaya hukum dan kearifan local (local wisdom) merupakan solusi terbaik dalam menangkal radikalisme yang senantiasa berkembang di Indonesia, terutama di daerah Jawa Tengah yang telah menjadi “zona merah” bagi perkembangan terorisme. Berbagai cara masih sangat mungkin dijadikan sebagai jalan untuk mengkompromikan paham keagamaan untuk bisa berjalan berdampingan satu dengan lainnya. Kearifan lokal yang merupakan sub dari budaya hukum adalah kekayaan sekaligus kekuatan untuk menjadi instrumen dalam mencairkan suasana dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih baik dan harmoni satu dengan lainnya.

Pencegahan radikalisme, baik berupa kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi sangat diperlukan mengingat radikalisme telah masuk ke setiap lini kehidupan dan ke semua kalangan masyarakat, baik orang tua, remaja, kaum perempuan bahkan anak-anak. Khususnya juga pada lingkungan Pondok Pesantren. Melihat hal tersebut, Kota Banyuwangi merupakan salah satu Kota di Jawa Timur yang juga cukup banyak memiliki Pondok Pesantren. Melihat hal tersebut, perlu dilakukan penyuluhan dan penangkalan melalui sinergi santri dan Polri agar pencegahan radikalisme dan ekstrimisme yang mengarah pada terorisme ini dapat dihindari khususnya pada Pondok Pesantren yang mayoritas santrinya masih remaja dan masih mudah untuk dirasuki oleh ajaran-ajaran yang berbahaya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu diadakan pengabdian kepada masyarakat agar Polri dan Santri dapat saling bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di daerah Banyuwangi dan mengetahui Bagaimana mengoptimalkan penyuluhan agar radikalisme dan ekstrimisme dapat dihindari disemua lingkup melalui sinergi Polri dan Santri. Santri yang akan dilakukan sinergi bersama sekitar 300 santri di Pondok Pesantren Al-Anwari Banyuwangi.

Dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga ini, permasalahan mitra yang dihadapi yaitu:

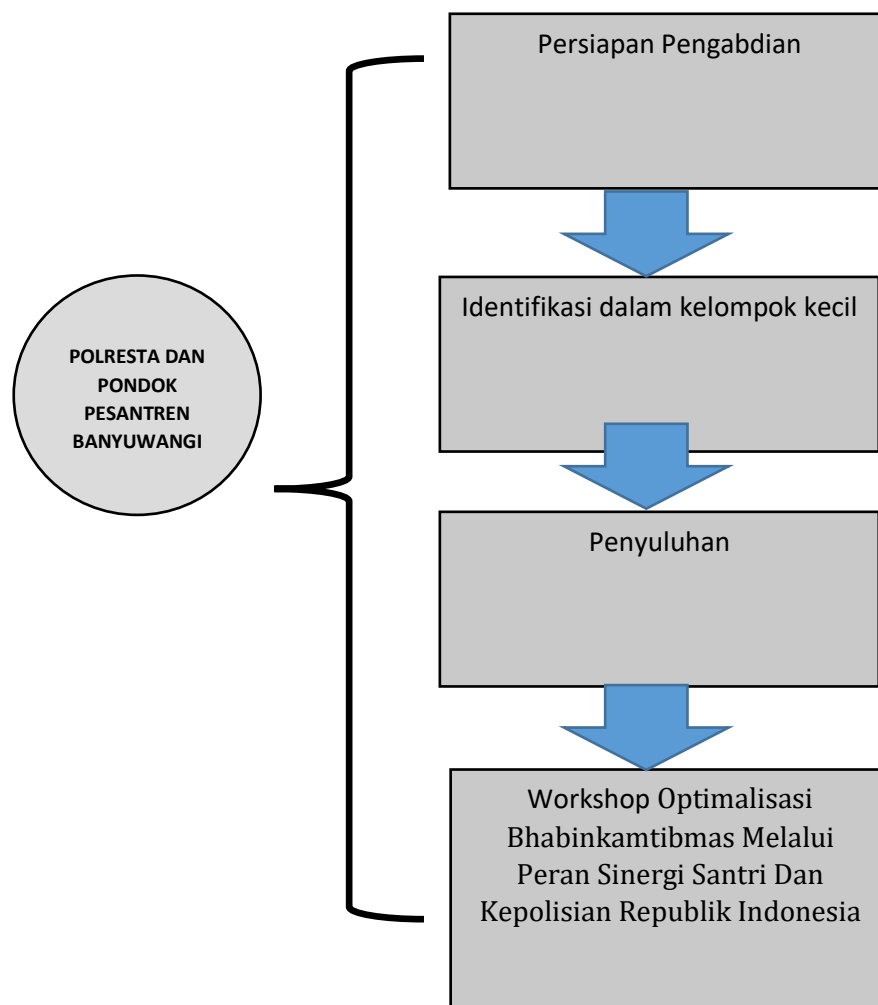
1. Belum memiliki wawasan tentang sinergitas bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban demi mewujudkan ketentraman bersama dengan santri Pondok Pesantren di Kota Banyuwangi.
2. Tidak mempunyai pengalaman dalam melakukan sosialisasi sinergitas bersama Santri

II. Metode Pelaksanaan

Dalam melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

1. Pertama dilakukan survey dan perijinan terkait dengan topik yang diangkat;
2. Kemudian melakukan pendampingan dengan memberikan sosialisasi sinergitas bersama santri bersama Polri;.
3. Memberikan tutorial terkait sinergitas bersama bhabinkamtibmas yang dilakukan santri Pondok Pesantren dengan institusi Polri;
4. Monitoring terkait adanya sinergitas bersama tersebut untuk memaksimalkan keamanan dan ketertiban bersama;
5. Asistensi jika timbul masalah terhadap persitiwa kejahatan di Banyuwangi agar santri dan Polri dapat langsung bekerjasama.
6. Metode pelaksanaan kegiatan Pengmas ini dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

Bagan 1: Metode Pelaksanaan Pengmas



Bagan diatas menjelaskan proses rangkaian kegiatan Pengmas akan dimulai dari tahapan persiapan kemudian dilanjutkan dengan identifikasi dalam kelompok kecil. Setelah itu akan dilakukan penyuluhan yang akan dilanjutkan dengan *workshop*.

III. Pembahasan

Pendekatan multikultural merupakan alternatif solusi dalam penangkalan dan penanggulangan radikalisme dengan revitalisasi dan reaktualisasi budaya hukum dan kearifan lokal sebagai perekat kerukunan masyarakat dengan segenap perbedaannya (bhinneka tunggal ika). Output dari cultural reinforcement ini adalah tumbuhnya jiwa nasionalisme (NKRI), dan pengakuan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Karakteristik dasar budaya hukum dan kearifan lokal adalah sebagai: (i) penanda identitas sebuah komunitas; (ii) elemen perekat lintas warga; (iii) kesadaran dari dalam sehingga tidak bersifat “memaksa”; (iv) pemberi warna kebersamaan sebuah

komunitas; (v) pengubah pola pikir dan hubungan interaktif di atas pijakan common ground; dan (vi) pendorong proses apresiasi dan partisipasi, sekaligus pengurang anasir yang merusak integrasi sosial. Peran budaya hukum dan kearifan komunitas masyarakat pesantren, masyarakat adat, dan masyarakat adat sangat diperlukan untuk menangkal dan menanggulangi radikalisme, mengingat adanya: (i) jaringan hubungan sosial (*networks of social relations*); (ii) rasa saling percaya (*reciprocal trust*); dan (iii) kemauan untuk saling membalas kebaikan (*norm of reciprocity*). Hal ini berpotensi untuk mengembangkan budaya kewarganegaraan (*network of civic engagement*) berbasis keadilan (*equity*), partisipasi sederajat, kolaborasi dan solidaritas. Budaya hukum dan kearifan lokal di Jawa Timur memiliki beberapa fungsi, yaitu: edukatif; informatif, profetik, rekreatif, dan fungsi ilmiah atau akademis.

Komunitas masyarakat pesantren melatih kultur asosiasional untuk menampilkan Islam yang damai dan promotif terhadap pluralitas dan demokrasi, serta anti kekerasan (*Rahmatan lil 'Alamin*). melalui pengembangan lima karakter pesantren, yaitu: *tawassuth* (tidak memihak atau moderasi); *tawazun* (menjaga keseimbangan dan harmoni); *tasammuh*, (toleransi), *tasyawwur* (musyawarah); dan *al-`adalah* (adil dalam beraksi ataupun bereaksi). Paradigma fungsionalisasi budaya hukum dan kearifan lokal komunitas pesantren (edukasi & enkulturasi) adalah: (i) upaya untuk membawa masyarakat kepada nilai ideologis dan faham agama yang benar dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah tantangan propaganda ideologis; dan (ii) upaya menjaga agar masyarakat dapat memiliki otonomi dan independensi dengan menghidupkan kesalehan dan kecerdasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh sebab itu, lingkungan Pesantren juga perlu bersinergi bersama dengan Polri. Bahwasanya peran menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat ini agar tetap aman dan tidak adanya radikalisme maupun ekstrimisme ini perlu dilakukan sinergitas bersama dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan ke Pesantren di Banyuwangi.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kota Banyuwangi ini berjalan dengan baik. Pondok Pesantren yang dijadikan tempat untuk sinergi bersama yakni Pondok Pesantren Al-Anwari Banyuwangi. Mengingat, pondok tersebut memiliki kurang lebih hampir 1000 santri yang tersebar dari gender laki-laki maupun perempuan.

Acara yang dilaksanakan di Masjid Pondok tersebut ini disambut dengan baik oleh para pengajar Pondok, khususnya K.H Achmad Siddiq, S.Ag., M.H.I selaku Kyai dari Pondok Pesantren tersebut.

Kegiatan dilaksanakan dengan metode seperti workshop penyuluhan kepada santri-santri yang menjadi peserta. Workshop penyuluhan diisi dengan narasumber yakni Ketua Progam Studi Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., ACI Arb.), Wakil Direktur III Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Prof. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.) yang hadir secara daring dan Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Banyuwangi yang diwakili oleh IPDA Hasyim. Dalam pembahasa narasumber tersebut yakni membahas bahwasanya santri merupakan tonggak untuk dapat merubah masa depan Negara Indonesia, jangan sampai santri terprovokasi dengan ikut arus dalam hal ekstrimisme, radikalisme dan terorisme. Santri harus dapat ikut serta dalam menjalankan amanah sesuai agama yang dipelajari yakni *rahmatan lil alamin*. Santri harus dapat bersinergi dengan Polri untuk memberikan rasa aman dan ikut serta dalam memberantas ekstrimisme, radikalisme dan terorisme. Jangan sampai suatu Pondok Pesantren menjadi kambing hitam cikal bakal adanya ekstrimisme, radikalisme dan terorisme.

Kegiatan yang dilakukan dihadiri kurang lebih sekitar 300 santri yang sangat antusias mengikuti *workshop* penyuluhan tersebut. Dalam kesempatan kegiatan ini juga melakukan sosialisasi dan edukasi tertib berlalu lintas. Anggota Polri tersebut menyampaikan, jangan sampai santri-santri terjebak dalam arus tidak melakukan pelanggaran lalu lintas diluar pondok pesantrennya. Karena bagaimanapun, salah satu bentuk penerapan ilmu yang didapat di pondok pesantren untuk penerapan *tawazun* adalah dengan tertib berlalu lintas.



(Dokumentasi Foto Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat)

IV. Kesimpulan

Pelaksanaan pengabdian berjalan dengan baik dan sesuai rencana, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, yang memposisikan diri sebagai “School of Leadership” melihat bahwa Pesantren yang merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, dengan santri-santrinya memiliki potensi yang luar biasa bagi kemajuan

masa depan bangsa. Gabungan antara ilmu hukum, sosial, dan budaya yang tetap dilandasi ilmu agama menjadi nilai plus bagi sistem pembelajaran di pondok-pondok pesantren, tak sedikit pula pesantren yang mampu menghasilkan lulusan unggul dan berkualitas. Tuntutan zaman yang membutuhkan manusia tidak hanya cerdas akan tetapi tanggap terhadap kondisi dan situasi yang terjadi, membuat Magister Kajian Ilmu Kepolisian dengan koordinator Program Studi, Dr. Prawitra Thalib, SH.,MH., ACI Arb. bersama mahasiswa mengadakan acara pengabdian masyarakat dengan topik Optimalisasi Bhabinkamtibmas melalui sinergi Santri dan Kepolisian Republik Indonesia di Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini hadir sebagai narasumber, IPDA Wahid Hasyim Basri Kanit Kamsel Polresta Banyuwangi yang membawakan paparan berjudul Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas, menurutnya dari cara berlalu lintas dengan tertib dan taat serta patuh terhadap aturan bisa menjadi jalan melatih kedisiplinan diri yang merupakan inti dari terbangunnya jiwa kepemimpinan.

Ucapan Terimakasih

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini berjalan dengan baik karena adanya dukungan dan support dari inisiator yakni Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., ACI Arb. selaku Ketua Progam Studi Kajian Ilmu Kepolisian, kemudian Bapak Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Banyuwangi yakni bapak Randy Asdar yang mana beliau juga Mahasiswa Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang diwakili oleh IPDA Wahid Hasyim Basri Kanit Kamsel Polresta Banyuwangi dan juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwari yang memberikan fasilitas tempat sekaligus menerima dengan tangan terbuka kedatangan tim Pengabdian Masyarakat Magister Kajian Ilmu Kepolisian yakni Bapak K.H. Achmad Siddiq, S.Ag., M.H.I. Ucapan terima kasih juga kepada Wakil Direktur III Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yakni Prof. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum yang menyempatkan ikut menjadi narasumber dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini menjadi titik awal terus bersinergi antara Pondok pesantren, Polresta Banyuwangi dan juga Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga serta terus terjaga sillaturahminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Thalib, Prawitra, AUFAR FADLUL HADY, and Muhammad Nur Kholiq. "Esensi Hukum Bisnis Syariah." (2021).
- Thalib, Prawitra, et al. "5C Principles in Profit and Loss Sharing Financing on Baitul Maal Wattamwil as Islamic Micro Finance In Indonesia." *Substantive Justice International Journal of Law* 3.2 (2020): 196-210.
- Thalib, Prawitra, et al. "Bantuan Sosial Sedekah Nasi Bungkus di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial." *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 5.1 (2022): 100-108.
- Thalib, P., & Kurniawan, F. (2018). Fungsi Lembaga Penjaminan Simpanan Dalam Membangun Sistem Perbankan Yang Solid Demi Kelangsungan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 2, 19-22.
- Thalib, Prawitra, et al. "Company Policy on Termination of Employment at Pandemic Covid-19 From a Fair and Justice Perspective." *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)*. Atlantis Press, 2020.
- Prawitra Thalib, S. H., & MH, A. (2018). *Syariah: Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Airlangga University Press.
- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2020). 5C Principles in Profit and Loss Sharing Financing on Baitul Maal Wattamwil as Islamic Micro Finance In Indonesia. *Substantive Justice International Journal of Law*, 3(2), 196-210.
- Thalib, Prawitra, et al. "PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKESINAMBUNGAN YANG BERORIENTASI PADA PENCAPAIAN PROFIT YANG MEMBAWA KEMASLAHATAN BAGI LINGKUNGAN." *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)* 5.2 (2021): 456-462.
- Thalib, Prawitra, et al. "Post-Mining Reclamation as An Environmental Policy: A Gold Mining Case Study." *Jurnal Halu Oleo Law Review* 4.2 (2020): 208-218.
- Thalib, Prawitra, et al. "THE URGENCE REGULATION OF BUSINESS ACTIVITIES ON ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTION ACCORDING LAW NO. 1 YEAR 2013 OF MICROFINANCE INSTITUTIONS." *Arena Hukum* 14.2 (2021): 207-221.
- Thalib, Prawitra, Eva Diana, and Mohamad Nur Kholiq. "Pemeriksaan Kesehatan Gratis GeNose C19 pada Santri Pondok Pesantren Nurul Khidmah Surabaya Oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga."
- Thalib, Prawitra, Eva Diana, and Mohamad Nur Kholiq. "Pengabdian Masyarakat melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis GeNose C19 pada Santri Pondok Pesantren Nurul Khidmah Surabaya." *Janaloka* 1.1 (2022): 28-38.
- Thalib, Prawitra, Faizal Kurniawan, and Mohamad Nur Kholiq. "The Application of Quranic Interpretation, of Sunnah And Ijtihad As The Source Of Islamic Law." *Rechtidee Jurnal Hukum* 15.2 (2020): 193-206.
- Thalib, Prawitra, Tri Veny Putri, and Mohamad Nur Kholiq. "Board Gender Diversity, Institutional Ownweship, and Divident Policy in Indonesia." (2021): 190-198.
- Wahyurudhanto, A. W. A. (2018). Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(2), 14.

- Kholiq, Mohamad Nur, Dinda Ajeng Puspanita, and Prawitra Thalib. "Copyright Protection of Art Containing Nudist Elements Under Positive Law In Indonesia." *Law and Justice* 6.2 (2022): 161-173.
- Kholiq, M. N., & Grigorius, E. S. (2021). Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislatif*, 168-179.
- Kholiq, M. N. (2020). *Skema Pembiayaan Independen Perumahan Berbasis Syari'ah (Studi Kasus Pembiayaan Fiktif PT. Cahaya Mentari Pratama)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Grigorius, E. S., & Kholiq, M. N. (2021). Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial. *Jurnal Legislatif*, 16-27.
- Wijoyo, Suparto, Prawitra Thalib, and Mohamad Nur Kholiq. "Merekonstruksi Good Corporate Governance Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Incorporated Sebagai Negara Kesejahteraan (Perspektif Regulasi-Deregulasi-Reregulasi Model Jatimnomic)." *Airlangga Development Journal* 6.1 (2022): 44-54.
- Winarsi, Sri, et al. "Sharia banking dispute resolution in Indonesia after the verdict of the constitutional court no. 93/puu-x/2012." *Utopía y Praxis Latinoamericana* 26.2 (2021): 408-416.